

Digital Marketing Sebagai Salah Satu Solusi Pemasaran Usaha Pada Bumdes Lentera Jaya

Agus Taufik Hidayat*,
Isnani Rohmah Fadhilah
STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi*: agustaufikhidayat7799@gmail.com

Abstrak

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diprakarsai oleh pemerintah pusat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Jombang termasuk desa Karangwinongan yang terletak di kecamatan Mojoagung, Jombang dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lentera Jaya. Jenis usaha yang dijalankan adalah pembuatan masker kain dan catering. Meskipun kegiatannya telah berjalan lama, namun sistem pencatatan pada masing-masing unit BUMDes yang kurang rapi karena keterbatasan pengurus BUMDes. Selain itu, sistem pemasaran juga masih dilakukan secara sederhana (offline) sehingga mengalami kendala pada saat pandemi Covid- 19. Untuk itu, penulis bersama team mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan fokus kegiatan yaitu memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes untuk merapikan pencatatan sesuai standar keuangan serta pelatihan pemasaran secara online. PKM dilakukan secara intensif selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Agustus 2021. Kegiatan ini berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil sesuai target yaitu adanya peningkatan kapasitas pengurus BUMDes Lentera Jaya dan terciptanya media sosial untuk pemasaran usaha yang dimiliki BUMDes Lentera Jaya.

Kata kunci: BUMDes Karangwinongan, Lentera Jaya, Administratif, sosial media, digital marketing

Abstract

The establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) which was initiated by the central government was immediately followed up by the Jombang local government including Karangwinongan village located in Mojoagung sub-district, Jombang by forming a Village-Owned Enterprise (BUMDes) Lentera Jaya. The type of business that is run is the manufacture of cloth masks and catering. Although its activities have been running for a long time, the recording system for each BUMDes unit is not neat due to the limitations of the BUMDes management. In addition, the marketing system is also still carried out in a simple way (offline) so that it encountered problems during the Covid-19 pandemic. For this reason, the author and the student team carried out community service activities (PKM) with a focus on activities, namely providing training to BUMDes management to tidy up records. according to financial standards and online marketing training. PKM was carried out intensively for 1 (one) month, namely in August 2021. This activity went well and got results according to the target, namely an increase in the capacity of the Lentera Jaya BUMDes management and the creation of social media for business marketing owned by Lentera Jaya BUMDes.

Keywords: BUMDes Karangwinongan, Lentera Jaya, Administrative, social media, digital marketing

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintahan presiden Joko Widodo terus berupaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya terus dilaksanakan, mulai dari pelibatan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah. Semua dituntut untuk ikut menyelesaikan program pemerintah (Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P; 2018).

Sebagai salah satu kewajiban yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, STIE PGRI Dewantara Jombang sebagai salah satu kampus terkemuka di Jombang terpenggil untuk ikut menyukseskan program pemerintah tersebut. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), tim penulis sebagai dosen di STIE PGRI Dewantara Jombang memberikan pelatihan dan pendampingan pada salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah pada tahun 2015, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lentera Jaya yang ada di desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung – Jombang.

Kegiatan PKM ini juga melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan. Sasaran kegiatan pada pelaksanaan PKM ini adalah: 1) Pendampingan penyusunan kelengkapan administrasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lentera Jaya Desa Karangwinongan – Mojoagung – Jombang; 2) Pembuatan sosial media guna pemasaran produk BUMDes Lentera Jaya. Kegiatan PKM ini dilakukan secara insentif selama kurang lebih 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus 2021. Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu adanya peningkatan kapasitas para pengurus BUMDes serta perluasan pasar produk BUMDes Lentera Jaya.

2. Profil Mitra Binaan

BUMDes Lentera Jaya merupakan sebuah Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Tepatnya berada di Jln. Desa Karangwinongan No. 489 Karangwinongan Mojoagung. BUMDes Lentera Jaya berdiri sejak tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 memberikan dana kepada BUMDes untuk kegiatan operasional, Dana operasional dari pemerintah yang mengawali BUMDes Lentera Jaya untuk membuka unit usaha Simpan Pinjam, produksi masker dan catering. Untuk usaha masker, BUMDes Lentera Jaya bekerja sama dengan PT Jaya Mas.

Unit usaha BUMDes Lentera Jaya memiliki usaha produsen masker dan Catering. Secara umum, masalah yang dihadapi adalah ketidakrapian pencatatan transaksi pada masing-masing unit usaha karena keterbatasan kemampuan para pengurus BUMDes Lentera Jaya. Selain itu, untuk usaha catering masih terdapat beberapa kekurangan yaitu: 1) Menu kurang inovatif, 2) Cara pengemasan produk catering kurang menarik, 3) Belum mengenal pemasaran secara online (digital marketing) menggunakan media sosial.

Melihat dari permasalahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan pelatihan terkait sistem pencatatan untuk para pengurus BUMDes Lentera Jaya, pembuatan akun media sosial untuk memasarkan produk catering dan masker.

B. TINJAUAN PUSTAKA

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh warga serta pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa serta dibangun bersumber pada kebutuhan serta kemampuan desa. BUMDes bagi Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah didirikan antara lain dalam rangka kenaikan Pemasukan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, selaku salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes wajib mempunyai perbandingan dengan lembaga ekonomipada biasanya. Ini dimaksudkan supaya keberadaan serta kinerja BUMDes mampu membagikan donasi yang signifikan terhadap kenaikan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak tumbuh sistem usaha kapitalistis dipedesaan yang bisa menyebabkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes selaku sesuatu lembaga ekonomi modal usahanya dibentuk atas inisiatif warga serta menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes wajib bersumber dari warga. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes bisa mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa ataupun pihak lain, Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah Pasal 213 ayat 3). Uraian ini sangat berarti untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, sebab implikasinya hendak bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Wilayah (Perda) ataupun Peraturan Desa (Perdes). Asset ekonomi yang terdapat didesa wajib dikelola seluruhnya oleh masyarakatdesa.

Wujud kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Usaha ini sebetulnya sudah diamanatkan didalam UU Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan usaha kepunyaan desa cocok dengan kebutuhan serta kemampuan desa. Disebutkan pula kalau tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka kenaikan Pemasukan Asli Desa (PADesa).

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

PKM ini dilaksanakan secara intensif oleh tim penulis dengan dibantu mahasiswa. Program yang ditawarkan tim pelaksana PKM adalah melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para pengurus BUMDes Lentera Jaya khususnya pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan media sosial untuk memasarkan produk BUMDes Lentera Jaya. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui kegiatan webinar serta luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim penulis dibantu mahasiswa dilakukan selama kurang lebih 3 minggu, yaitu pada tanggal 26 Juli sampai tanggal 19 Agustus 2021. Pelaksanaan dilakukan secara langsung terjun ke lapangan yaitu pendampingan langsung ke BUMDes Lentera Jaya Mojoagung serta pendampingan secara daring mengingat, saat pelaksanaan PKM masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Persiapan awal yang dilakukan sebelum turun ke lokasi adalah melakukan pertemuan secara daring bersama antara pengurus BUMDes Lentera Jaya, mahasiswa dan tim penulis dengan tujuan untuk menyamakan persepsi guna kelancaran kegiatan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati secara intensif selama 3 (tiga) minggu.

Dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan diperoleh hasil yang memuaskan. Tim penulis dan mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan administratif para pengurus BUMDes Lentera Jaya serta memberikan ide inovatif dan kreatif untuk menu catering. Selain itu, juga tercipta media sosial untuk pemasaran produk BUMDes Lentera Jaya.



Gambar 2: kegiatan masker dan webinar digital marketing

E. PENUTUP

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di BUMDes Lentera Jaya Karangwinongan Mojoagung yang diselenggarakan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021 telah mencapai target yang diharapkan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi support bagi para pengurus BUMDes Lentera Jaya untuk lebih membangun usahanya serta mencari potensi baru desa Karangwinongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mutiarni, R. (2017). Implementasi Electronic Data Processing Pada Koperasi Wanita. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 12(2 Okt), 135-148.
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang. *Comvice: Journal of community service*, 2(1), 21-28.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun, (8)
- Undang-Undang, R. I. No. 32 tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah. Indonesia, R. (1999).